

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membiayai pembangunan, Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, keuntungan Badan Usaha Milik Negara, hibah, barang sitaan/denda, dan masih banyak lagi salah satunya yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di negara Indonesia. Setiap tahun pajak di Indonesia mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2016 penerimaan pajak mencapai 1.285,0 triliun, setelah itu di tahun 2017 meningkat 14,6% sebesar 1.472,7 triliun, pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 1.618,1 triliun. Hal ini harus selalu ditingkatkan lagi, ketika sumber daya alam tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relative terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan public, mengalokasikan pajak tidak hanya

untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan. Faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Namun faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* yang dimana pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak, berganti menjadi *self*

assessment system yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Sekarang terdapat aplikasi pajak yang mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pajak yaitu elektronik SPT (e-SPT). Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Sekarang dengan adanya e-SPT mempermudah dan mempercepat dalam pelaksanaan *self assessment system*. e-SPT merupakan salah satu bentuk inovasi dari institusi Direktorat Jenderal Pajak. Karena selama puluhan tahun pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak dilaporkan oleh WP secara manual menggunakan banyak kertas, namun hal ini dapat diminimalkan penggunaan kertasnya melalui penggunaan aplikasi e-SPT. Selain itu e-SPT juga mempermudah pihak fiskus dalam mengolah data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.

Banyak jenis aplikasi e-SPT dilihat dari kegunaannya, terdapat 8 jenis e-SPT sebagai berikut:

- e-SPT PPN
- e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan
- e-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
- e-SPT PPh Pasal 4 (2)

- e-SPT PPh Pasal 15
- e-SPT PPh Pasal 21
- e-SPT PPh Pasal 22
- e-SPT PPh Pasal 23/26

e-SPT PPh Pasal 22 digunakan untuk pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai fenomena dalam dunia perpajakan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “MEKANISME PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI BESI BAJA MENGGUNAKAN E-SPT PADA PT. MANNA JAYA MAKMUR KABUPATEN MOJOKERTO”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut untuk mengetahui proses

Mekanisme Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Besi Baja Menggunakan e-SPT pada PT. Manna Jaya Makmur Kabupaten Mojokerto.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Selain terdapat tujuan studi lapang, didalam laporan ini juga terdapat manfaat yang diberikan untuk beberapa pihak yang terkait. Pertama, bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam Mekanisme Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Besi Baja Menggunakan e-SPT pada PT. Manna Jaya Makmur Kabupaten Mojokerto, serta untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah. Kedua bagi pembaca yaitu sebagai bahan referensi pembelajaran para pembaca atau penelitian selanjutnya yang ada kaitannya mengenai Mekanisme Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Besi Baja Menggunakan e-SPT pada PT. Manna Jaya Makmur Kabupaten Mojokerto.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasann mengenai pembahasan masalah ini, hal ini bertujuan agas arah pembahasan tidak terlalu luas. Maka, penulis hanya membahas tentang Mekanisme Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Besi Baja Menggunakan e-SPT pada PT. Manna Jaya Makmur Kabupaten Mojokerto.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan langsung pada Kantor PT. Manna Jaya Makmur, serta mengumpulkan data-data yang mengenai mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT PPh pasal 22 atas penjualan produksi besi baja menggunakan e-SPT.
2. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan (pemberi informasi). Dalam metode ini data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pegawai Kantor bidang administrasi perpajakan PT. Manna Jaya Makmur .
3. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau tabel yang diambil secara langsung oleh penulis di PT Manna Jaya Makmur.